



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 (0752) 84506 Padang Panjang 27118
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Maret 2026



~~Inspektur~~
Fertno Ramko, S.STP, M.Si
Pembina IVa/ Ntp.198602102006021001

DAFTAR ISI

	Hal
SURAT PERNYATAAN REVIEW	
DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	lii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tugas Dan Fungsi Unit Kerja	4
1.3 Struktur Organisasi	11
1.4 Sumber Daya Manusia	13
1.5 Aspek Strategis Dan Isu Strategis	14
1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Penjenjangan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	21
2.2 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Program Prioritas	24
2.3 Indikator Kinerja	25
2.4 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.5 Program dan Kegiatan	27
2.6 Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	32
3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
3.3 Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Hal
Tabel 1.1	Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025	13
Tabel 1.2	Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	13
Tabel 1.3	Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut golongan Tahun 2025	13
Tabel 1.4	Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
Tabel 1.5	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat	18
Tabel 2.1	Perbandingan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum dan sesudah perubahan	24 25
Tabel 2.2	Perbandingan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum dan sesudah perubahan	25
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RPD Tahun 2024 – 2026)	26
Tabel 2.5	Strategi dan Arah Kebijakan	27
Tabel 2.6	Tujuan, Sasaran, Indikator Renstra 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran, Indikator RPD 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30
Tabel 2.9	Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31
Tabel 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, 2024 dan 2025	38
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029	38
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir RPD Tahun 2024-2026	39
Tabel 3.4	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai	40
Tabel 3.5	Analisis Efisiensi Sumber Daya	40
Tabel 3.6	Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025	41

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Hal
Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12
Gambar 1.2	Analisis SWOT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15
Gambar 2.1	Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	22
Gambar 2.2	Crosscutting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029	23

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025
- Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Tahun 2025-2029 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD Tahun 2024-2025
- Lampiran 3 Realisasi Renaksi TW I s.d IV Tahun 2025
- Lampiran 4 Tabel rencana tindak lanjut SAKIP oleh Inspektorat Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 merupakan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran utama Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 - 2029 dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. LKJIP tahun 2025 disusun dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu menggunakan penghitungan kinerja RPD tahun 2024-2026 dan penghitungan kinerja RPJMD Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak dengan indikator IKLI KePUan. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran dengan 3 (tiga) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator sasaran Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik dengan target Tahun 2025 sebesar 79,16%.
2. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan indikator sasaran Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan target Tahun 2025 sebesar 83,20%.
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target Tahun 2025 sebesar 68,75.

Upaya yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran Renstra ke Dalam Dokumen Perencanaan Tahunan (Renja).
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjabarkan Renstra yang berlaku 5 tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang berpedoman pada Renstra dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
 - Menetapkan program, kegiatan, dan sub-kegiatan prioritas yang realistis untuk mencapai target sasaran strategis dan dilanjutkan dengan menyusun rencana aksi Triwulanan dan Tahunan

2. Sinkronisasi dengan Renstra dan Isu Strategis
3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, mencakup keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dan Menggunakan indikator tersebut sebagai ukuran berfungsinya program yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan Program dan Penganggaran
 - Mengimplementasikan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta beban kerja organisasi
 - Menyusun Anggaran (RKA) yang konsisten dengan perencanaan program prioritas untuk memastikan pencapaian target jangka menengah
5. Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Renstra)

Capaian 3 (tiga) indikator sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan indikator Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik dengan target kinerja 79,16% terealisasi 77,57% dengan tingkat capaian 97,99%. Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain:
 1. Kondisi infrastruktur yang sebagian telah berumur tua
 2. Data perencanaan yang belum memadai
 3. Pendanaan yang belum mencukupi dalam pencapaian target kegiatan
 4. Rendahnya partisipasi masyarakat
 5. Hambatan bencana alam yang terjadi tanggal 27 November 2025 yang merusak infrastruktur jalan, bangunan dan drainase yang mengurangi kualitas infrastruktur

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

 1. Pemutakhiran data perencanaan, sebagai bahan untuk pembangunan infrastruktur.
 2. Meningkatkan Pendanaan dengan menggunakan/memanfaatkan dana instansi vertikal
 3. Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
 4. Dalam hal rekonstruksi pasca bencana akan dilakukan perencanaan ditahun 2026.
 2. Capaian indikator sasaran Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan target 83,20% realisasi 83,35 dengan capaian 100,18% merupakan Lahan yang sesuai tata ruang Kota Padang Panjang dengan luas 2877,0829 ha dibandingkan dengan wilayah Kota Padang Panjang 2916,8724 yang diperoleh menunjukkan kesesuaian tata ruang dengan RTRW.
- Faktor yang mendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2025 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada

Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

3. Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang target 68,75 realisasi 67,60 dengan capaian 101,24.

Realisasi Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 69,60 menunjukkan predikat "B" (Baik) berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai kondisi sebagai berikut :

- Menyelaraskan target Perjanjian Kinerja dengan Rencana Aksi.
- Melengkapi dokumen laporan kinerja dengan analisis hasil (bukan sekedar angka capaian).
- Memperkuat efisiensi anggaran dan efektivitas SDM.
- Menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun sebelumnya untuk perbaikan ke predikat BB (Sangat Baik).

Tujuan dari RPD Tahun 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada 2 (dua) yaitu :

1. Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas dengan indikator IKLI KePUan
2. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang dengan indikator Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Untuk mewujudkan 2 tujuan tersebut terdapat 2 (dua) indikator sasaran RPD 2024-2026 dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas indikator Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik adalah data rata-rata pembangunan jalan, irigasi, sungai drainase, trotoar, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab dengan target kinerja 74,34% terealisasi 77,57% dengan tingkat capaian 104,33%. Dibandingkan dengan capaian Renstra 2025 -2029 capaian ini yang disebabkan target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan target renstra Tahun 2025-2029.
2. Capaian indikator sasaran Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan target 3 realisasi 3 dengan capaian 100% merupakan Lahan yang sesuai tata ruang Kota Padang Panjang dengan luas 2877,0829 ha dibandingkan dengan wilayah Kota Padang Panjang 2916,8724 ha. Indeks 3 dengan range indeks 75% s/d 100% nilai 98,64% yang diperoleh menunjukkan kesesuaian tata ruang dengan RTRW.

Faktor yang mendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2024 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

1.2 Tugas Dan Fungsi Unit Kerja

Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2024, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Dinas PUPR dipimpin oleh Kepala Dinas serta bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

(1) Tugas Kepala Dinas

Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan, serta tugas perbantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Fungsi Kepala Dinas :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas PUPR adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Bina Jasa Konstruksi
3. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air
4. Bidang Cipta Karya
5. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
6. UPTD

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. **Sekretariat,**

(1) Tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik Negara dan kerumahtanggaan kantor.

(2) Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran DPUPR;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi serta penyusunan produk hukum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara dilingkungan DPUPR;
- e. penyusunan analisis jabatan dan beban kerja dilingkungan DPUPR;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan dilingkungan DPUPR;
- g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan pada DPUPR;
- h. fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup DPUPR;
1. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat; dan
- J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas : Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan

rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

(2) Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup DPUPR;
- b. pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
- c. penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi DPUPR;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan DPUPR;
- e. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
- f. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan DPUPR;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset;
- h. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- i. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan DPUPR;
- j. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat pada subbagian umum dan kepegawaian;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup DPUPR;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Bina Jasa Konstruksi

- (1) Tugas : bidang bina konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program kerja pada bidang bina konstruksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait bina konstruksi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - e. melakukan kegiatan pendataan proyek di Daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
 - f. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - g. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - i. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - j. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
 - k. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
 - l. pengelolaan data dan informasi pada bidang bina konstruksi;
 - m. pengelolaan kearsipan pada bidang bina konstruksi;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang bina konstruksi;
 - o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang bina konstruksi;
 - p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang bina konstruksi; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

- (1) Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Fungsi : Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan program kerja pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, utilitas lainnya, peralatan, dan pengujian;
 - e. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - g. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - h. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - i. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - j. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - k. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - l. pengelolaan data dan informasi pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - m. pengelolaan kearsipan pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air; dan

- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Cipta Karya

- (1) Tugas : Bidang cipta karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan cipta karya
- (2) Fungsi: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja pada bidang cipta karya;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait cipta karya;
 - c. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya;
 - d. sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
 - f. pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum di Daerah;
 - g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - h. pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
 - i. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - j. penyelenggaraan bangunan gedung;
 - k. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
 - l. pengelolaan data dan informasi pada bidang cipta karya;
 - m. pengelolaan kearsipan pada bidang cipta karya;
 - n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang cipta karya;
 - o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang cipta karya;
 - p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang cipta karya; dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

(1) Tugas : melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan tata ruang dan pertanahan.

(2) Fungsi :

- b. Penyusunan perencanaan program kerja pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- c. perumusan kebijakan teknis terkait tata ruang dan pertanahan;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- e. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
- g. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- h. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- i. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- j. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- k. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- m. koordinasi dan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;
- n. operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang.
- o. penerbitan izin membuka tanah;
- p. penyelesaian masalah tanah kosong;
- q. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- r. penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- s. fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- t. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- u. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;

- v. pengelolaan data dan informasi pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- w. pengelolaan kearsipan pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- x. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- y. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- z. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang tata ruang dan pertanahan; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. UPTD

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

1.3 Struktur Organisasi

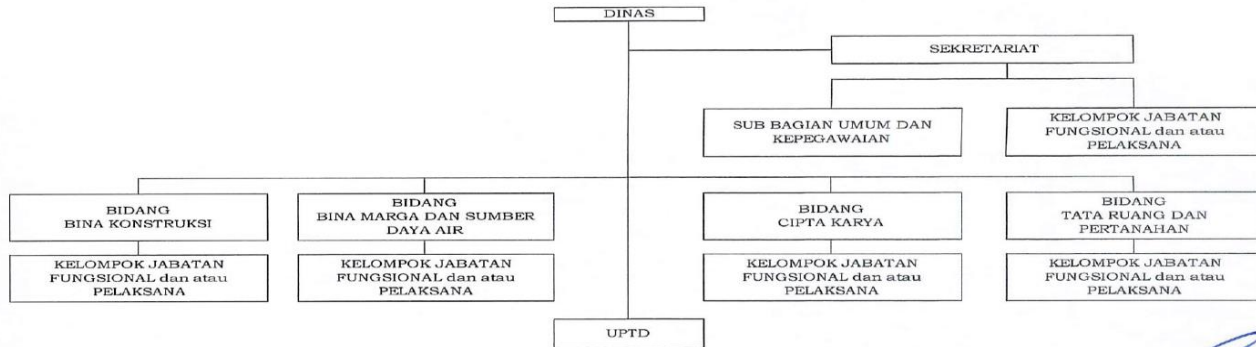
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Gambar 1.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG NOMOR 39 TAHUN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



No	Jabatan	Nama	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG

[Signature]
SONNY BUDAYU PUTRA

TELAH DIPERIKSA OLEH
BAGIAN HUKUM
Kabag Hukum
Kesubag Hukum - Undang

1.4 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang menurut golongan ruang/kepankangan dan jenis kelamin pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah ASN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2025

No.	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	ASN	44	20	64	100

Berdasarkan kualitas dan tanggungjawab kerja, SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibedakan menurut basis pendidikan dan unit kerjanya terinci pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2025

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	1	1	2	2
2	SLTP	2	2	4	2
3	SLTA	8	5	13	17
4	Muda/D3 Sarjana	8	3	11	22
5	Sarjana (S1)	18	8	21	43
6	Pasca Sarjana/ Master (S2)	3	4	7	14
	Jumlah	44	20	64	100 %

Tabel. 1.3
Jumlah ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
menurut golongan Tahun 2025

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	P3K	2	1	3	4
	P3K Paruh Waktu	12	4	16	25
	Golongan I	5	2	7	10
	Golongan II	21	9	30	46
	Golongan III	4	4	8	15
	Jumlah	44	20	64	100

1.5 Aspek Strategis Dan Isu Strategis

1. Aspek Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki aspek strategis selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Aspek Strategis yang menjadi kekuatan (*strengths*) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah :

1. Tersedianya Sumber Daya Manusia teknis dalam pengelolaan sarana dan prasarana umum.
2. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah.
3. Adanya komitmen bersama pengelola sarana dan prasarana umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terhadap pengelolaan sarana dan prasarana umum
5. Tingginya dukungan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana umum.
6. Sistem informasi yang terus berkembang.

Disamping aspek kekuatan (*strengths*) terdapat kelemahan (*weakness*) kinerja pelayanan dapat dilihat dari hal-hal berikut ini :

1. Belum optimalnya layanan infrastruktur drainase
2. Layanan infrastruktur jalan belum memadai
3. Layanan infrastruktur SDA masih ada yang tidak berfungsi
4. Belum terpenuhinya layanan infrastruktur air minum kota
5. Layanan infrastruktur air limbah belum optimal
6. Pembangunan Infrastruktur Bangunan gedung belum sesuai ketentuan yang berlaku
7. Belum optimalnya implementasi tata ruang

Adapun yang menjadi tantangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain terjadinya bencana alam yang menyebabkan kerusakan infrastruktur atau kondisi cuaca yang menghambat pekerjaan pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi infrastruktur, perubahan kebijakan yang mengurangi anggaran untuk infrastruktur serta rendahnya partisipasi masyarakat stake holder lainnya.

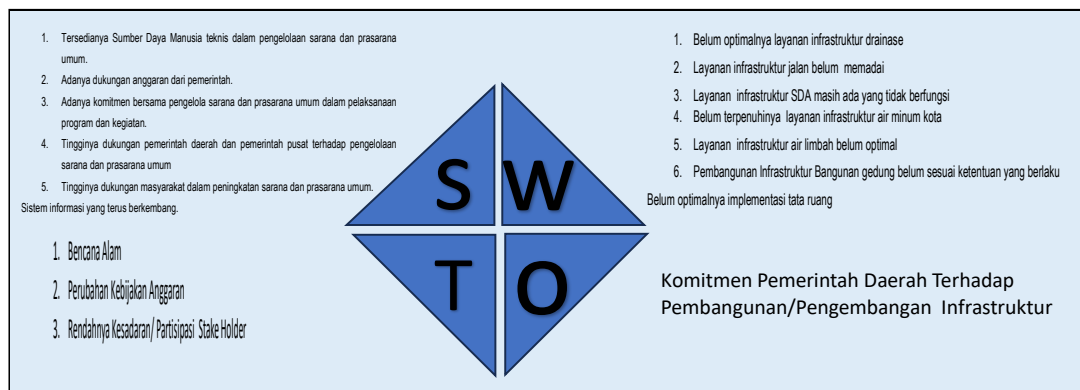
Adapun yang menjadi peluang (*opportunities*) bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah tingginya komitmen pemerintah dalam pengembangan infrastruktur yang dibuktikan dengan tetap memasukkan peningkatan infrastruktur kota dalam tujuan renstra.

Ancaman yang menjadi penghambat pencapaian kinerja ditahun 2025 :

1. berupa hambatan bencana alam yang terjadi tanggal 27 November 2025 yang merusak infrastruktur jalan, bangunan dan drainase yang mengurangi kualitas insfrastruktur
2. komitmen pendanaan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi sesuai amanat PP No. 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi. Kegiatan ini mengalami Refocusing Anggaran dari sehingga kegiatan pelatihan sertifikasi tidak dilaksanakan
3. Hambatan dari aspek partisipasi masyarakat. Sebagian kecil masyakat masih menggunakan drainase dan sungai sebagai sarana pembuangan tinja. Dari segi penegakan hukum tata ruang masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Gambar 1,2

ANALISIS SWOT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



2. Isu Strategis

Untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dibidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Perumusan isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada Tabel 1.4 berikut

Tabel 1.4
Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Kenaikan IKLI ke PU an	Masih rendahnya rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Kebutuhan infrastruktur cerdas yang berfokus pada teknologi inovatif berkelanjutan (hijau)	(1) pendanaan besar yang dibutuhkan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) (2) mitigasi perubahan iklim (3) kebutuhan akan infrastruktur (4) infrastruktur cerdas yang berfokus pada teknologi inovatif berkelanjutan (hijau)	(1) tantangan pembebasan lahan (2) keterbatasan dana (3) perbedaan prioritas pembangunan (4) keterlambatan koordinasi antarinstansi (5) kurangnya tenaga kerja terampil di daerah tertinggal	(1) ketimpangan pembangunan antarwilayah (2) kurangnya konektivitas yang menghambat potensi ekonomi (3) tantangan pembiayaan dan lahan (4) masalah lingkungan hidup (5) keterbatasan sumber daya manusia yang terampil.	(1) Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan (2) Peningkatan kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang
	Masih rendahnya akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaian					
	Belum Optimalnya infrastruktur dasar perkotaan					
	Belum Optimalnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan daerah					

Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara serius pada periode perencanaan 2025–2029.

Pertama Masih rendahnya rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman dimana Peningkatan akses sanitasi aman untuk Kota Padang Panjang masih sangat kecil

Kedua Masih rendahnya akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaian dimana Peningkatan penggunaan air kemasan untuk minum, menjadi hal yang perlu diperhatikan terkait kelayakan air perpipaian Kota Padang Panjang sebagai air minum

Ketiga Belum Optimalnya infrastruktur dasar perkotaan dimana kondisi sarana prasarana drainase yang tidak optimal.

Keempat Belum Optimalnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan daerah dimana Belum tersusun RDTR

Dengan demikian, dua isu strategis utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode 2025–2029 adalah:

1. Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan
2. Peningkatan kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang

Identifikasi isu strategis tersebut sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

1.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Inspektorat

Selama tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan tindak lanjut atas LHP ditahun 2025 seperti pada tabel 1.5 berikut :

Tabel 1.5

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2024									
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
1	A. Perencanaan Kinerja								
	1 Melakukan perbaikan penjeangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan rumusan logical framework, mengidentifikasi seluruh critical succes factor atas pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Penjeangan kinerja dengan memperhatikan logical framework disusun pada saat penyusunan Renstra 2025-2029 yang akan menjadi lampiran Renstra dimaksud	3 bulan	Oktober s/d Desember 2025	Sekretariat	Tahap penyusunan	Penyusunan pohon kinerja	tidak ada	
	2 Melakukan pemetaan pada penjenjangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar organisasi dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam pencapaian kinerja								
	B. Pengukuran Kinerja								
	1 Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (decision maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala.	Kepala Dinas selaku pengambil keputusan (decision maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala dalam bentuk Rapat dengan eselon 3 dan 4 secara berkala	12 bulan	Januari - Desember 2025	Sekretariat	Rapat berkala telah dilaksanakan ditambah dengan permintaan informasi ke masing-masing pejabat pelaksana kegiatan	Rapat berkala telah dilaksanakan ditambah dengan permintaan informasi ke masing-masing pejabat pelaksana kegiatan	tidak ada	

	2	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment dalam aplikasi TPP dan aplikasi Simbangda	12 bulan	Januari - Desember 2025	Sekretariat	hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment dalam aplikasi TPP dan aplikasi Simbangda			
	3	Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan)	pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan) melalui rapat evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas	12 bulan	Januari - Desember 2025	Sekretariat	pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan) melalui rapat evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas			
	4	Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dengan memberikan penilaian kinerja pada aplikasi TPP dan simbangda	12 bulan	Januari - Desember 2025	Pejabat Struktural	dilaksanakan pada saat penilaian kinerja bulanan	telah dilaksanakan	Penilaian masih subjektif sesuai aplikasi TPP	
	5	Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.kemenpan.go.od	Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.kemenpan.go.od	3 bulan	Oktober s/d Desember 2025	Sekretariat	Sedang dilaksanakan	Sedang dilaksanakan	sumber daya yang tidak tersedia terkait konversi data ke pdf	
C. Pelaporan Kinerja										
	1	Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional (benchmar kinerja) dan analisis penggunaan sumber daya.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional (benchmar kinerja) dan analisis penggunaan sumber daya.	4 bulan	Januari - Mei 2026	Sekretariat	pengumpulan data	belum dilaksakan	akses pada ketersediaan data realisasi nasional	

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja										
	1	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk peningkatan	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	12 bulan	Januari - Desember 2025	Sekretariat	dilaksanakan secara bertahap	90%		

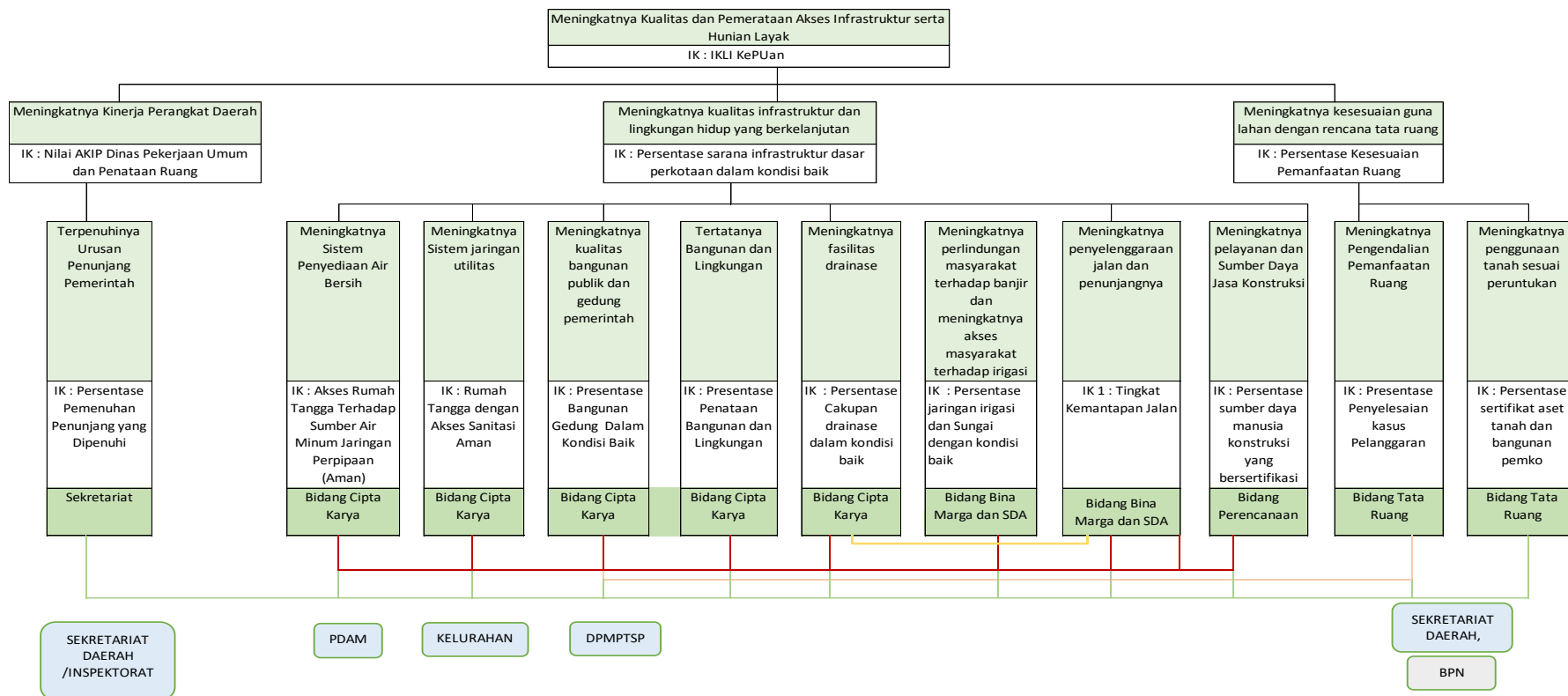
BAB II

PERENCANAAN KERJA

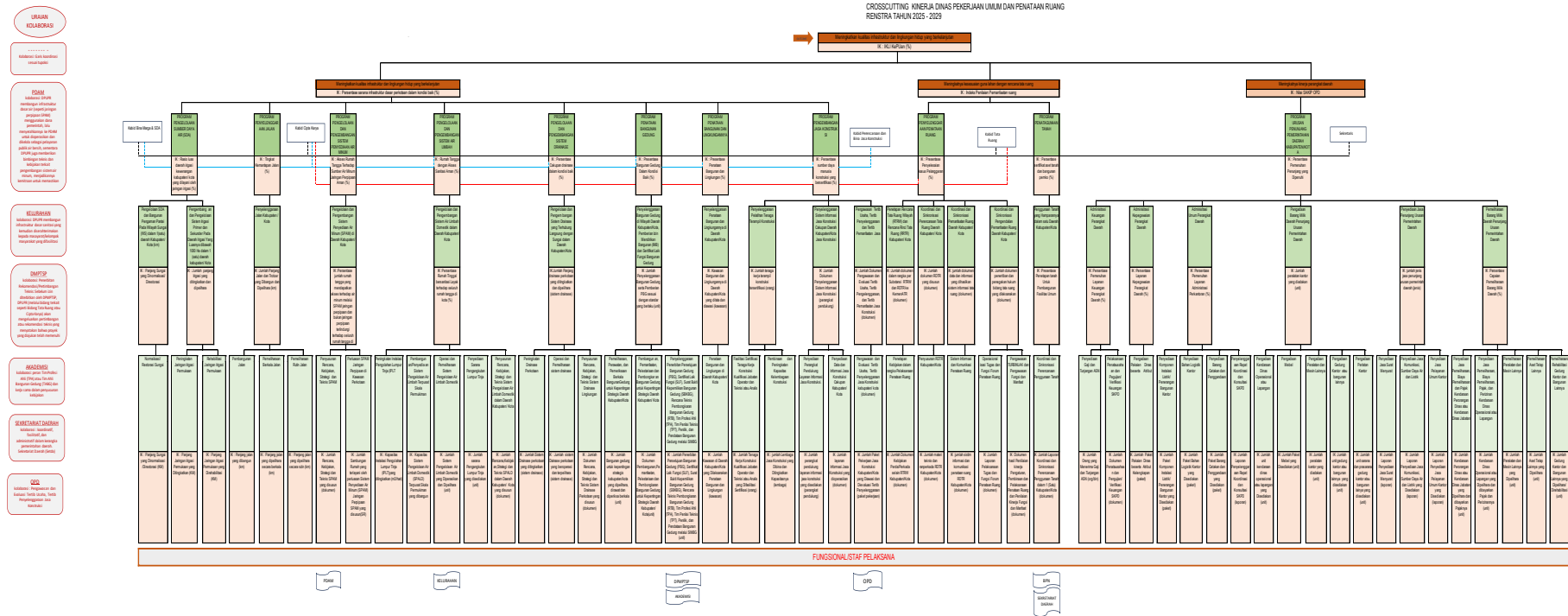
2.1 Penjenjangan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Tujuannya antara lain untuk menyelaraskan kinerja organisasi (Kepala Dinas) kepada kinerja unit (Bidang) dan individu dengan baik. Dalam pencapaian tujuannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mensinergikan seluruh bidang. Bidang-bidang yang terkait dalam pencapaian infrastruktur saling berkolaborasi dengan melibatkan stakeholder diluar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti PDAM terkait capaian SPM Air Minum, Kelurahan se Padang Panjang terkait SPM Limbah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk perizinan bangunan dan BPN, Sekretariat Daerah serta BPKD terkait Penataan Ruang, seperti yang tergambar dalam pohon kinerja dan crosscutting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada gambar 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.1
Pohon Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2025-2029



Gambar 2.2
Crosscutting Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2025-2029



2.2 Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang sebelumnya menggunakan RPD Tahun 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tahun 2025 tidak terdapat revisi/perubahan terhadap Renstra 2025 -2029 karena merupakan periode awal Renstra.

1. Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang sebagai penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pertanahan 2025-2029 yakni “ Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak ” Pada tabel dibawah ini merupakan perbandingan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum (RPD 2024-2026)	Sesudah (Renstra 2025-2029)
<u>Tujuan:</u> 1. Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas 2. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	<u>Tujuan:</u> 4. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak

2. Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi, perlu ditentukan sasaran apa yang akan dilakukan untuk pencapaian tersebut, oleh karenanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 3 (tiga) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Pada tabel dibawah ini merupakan perbandingan Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum dan sesudah perubahan

Sebelum (RPD 2024-2026)	Sesudah (Renstra 2025-2029)
<p><u>Sasaran</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas 2. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang 	<p><u>Sasaran:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan 4. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang 5. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

2.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator	Target Tahun 2025	Rumus yang digunakan
1	2	3	4
1	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	79,16%	Rata-rata Pembangunan Jalan, Irigasi/Konservasi Sungai, drainase, Trotoar, sarana Sanitasi, x 100%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	83,20%	Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
3.	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,75	Jumlah Presentase bobot/Nilai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi internal dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator kinerja Sasaran Daerah merupakan salah satu indikator pendukung penghitungan sasaran daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (RPD Tahun 2024 – 2026)

No	Indikator	Target Tahun 2025	Rumus yang digunakan
1	2	3	4
1	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	74,35%	Rata-rata Pembangunan Jalan, Irigasi/Konservasi Sungai, drainase, Trotoar, Bangunan Gedung, Trotoar, Bangunan Gedung, sarana Sanitasi, x 100%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	3,0	Indeks Penilaian Pemamfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang

Indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga menjadi indikator dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pemilihan langkah-langkah spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Lokasi (Sesuai RTRW)
Peningkatan akses sanitasi aman untuk Kota Padang Panjang masih sangat kecil Peningkatan penggunaan air kemasan untuk minum, menjadi hal yang perlu diperhatikan Optimalisasi Sarana dan prasarana irigasi Optimalisasi sarana prasarana jalan Optimalisasi sarana prasarana drainase	1) Penyediaan dan pengembangan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial	1) Pembangunan dan Peningkatan kemandapan jalan	Kota Padang Panjang
		2) Peningkatan bangunan dan fungsi sarana prasarana umum	Kota Padang Panjang
		3) Penguatan dan pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur air baku, air minum, irigasi dan sanitasi	Kota Padang Panjang
		4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sumber daya air dan sanitasi	Kota Padang Panjang
		5) Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara jasa konstruksi	Kota Padang Panjang
Optimalisasi Penyusunan RDTR	1) Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	1) Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)	Kota Padang Panjang
		2) intensifikasi peningkatan aturan pemanfaatan ruang	Kota Padang Panjang
		3) Pengembangan insentif dan disinsentif pemanfaatan ruang	Kota Padang Panjang
		4) Pengembangan teknologi menuju efisiensi pemanfaatan ruang	Kota Padang Panjang

2.5 Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang dalam tahun anggaran 2025 telah dapat melaksanakan 9 (sembilan) program dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, diantaranya :

- ◆ Program Umum adalah program rutin yang mendukung kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan baik internal maupun eksternal
- ◆ Program Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah program-program yang menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan SPM dan Non SPM.
- ◆ Program Prioritas adalah program yang mendukung sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi dasar penghitungan indikator kinerja utama perangkat daerah.

- ◆ Program Sasaran Daerah adalah program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung capaian sasaran kinerja daerah menjadi dasar penghitungan peningkatan pelayanan infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas di Kota Padang Panjang sebagaimana tertuang dalam RPD periode 2024-2026.

Tabel 2.6

Tujuan, Sasaran, Indikator Renstra 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal 2024	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak		IKLI KePUan	96,71	96,81	96,91	97,01	97,11	97,21	97,31	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	78,96	79,16	79,36	79,56	79,76	79,96	80,16	
		Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83	83,20	83,40	83,60	83,80	84,00	84,20	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,25	68,75	70,93	73,12	75,30	77,49	79,67	

Tabel 2.7

Tujuan, Sasaran, Indikator RPD 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	AWAL 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas		IKLI KePUan		90,13 %	90,53 %	90,63 %	91 %
		Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang direncanakan x 100%	72,76 %	72,88 %	74,35 %	76,11 %
2	Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang		Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase kesesuaian program struktur ruang+pola ruang/2x100%	82 %	83 %	83,5 %	84 %
		Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks penilaian pemanfaatan ruang	indeks dari Luas pemanfaatan ruang sesuai RTR (Ha)/Total luas pemanfaatan ruang RTR (Ha) x100%	3	3	3	3

2.6 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025-2029

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	79,16%
2.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	83,20%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,75
No.	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.420.743.606,00	7.169.801.914,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.491.358.910,00	2.982.406.630,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200.500.000,00	364.936.340,00
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	872.731.600,00	823.951.100,00
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.940.773.850,00	3.810.936.850,00
6	Program Penataan Bangunan Gedung	557.500.000,00	3.125.827.000,00
7	Program Penyelenggaraan Jalan	2.762.428.370,00	6.848.497.617,00
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	267.000.000,00	92.376.500,00
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	395.201.950,00	665.468.600,00
10	Program Penatagunaan Tanah	12.650.000,00	81.149.700,00

Pada tabel dibawah ini merupakan perbandingan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	74,35%	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	79,16%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang	3,00	2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,20%
			-	3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,75

No.	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.420.743.606,00	7.169.801.914,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.491.358.910,00	2.982.406.630,00
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	200.500.000,00	364.936.340,00
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	872.731.600,00	823.951.100,00
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	3.940.773.850,00	3.810.936.850,00
6	Program Penataan Bangunan Gedung	557.500.000,00	3.125.827.000,00
7	Program Penyelenggaraan Jalan	2.762.428.370,00	6.848.497.617,00
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	267.000.000,00	92.376.500,00
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	395.201.950,00	665.468.600,00
10	Program Penatagunaan Tanah	12.650.000,00	81.149.700,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dari hasil evaluasi pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dapat dihitung capaian indikator utama dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta target dan capaian realisasi dapat dirinci sebagai berikut :

1. Membandingkan Target dengan Realisasi Kinerja

Capaian kinerja indikator utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang juga tertuang dalam RPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2025-2029 serta menjadi perjanjian kinerja pimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 yang didukung oleh Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan target dan realisasi pada tabel berikut :

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan indikator Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik adalah data rata-rata pembangunan jalan, irigasi, sungai drainase, trotoar, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab dengan target kinerja 79,16% terealisasi 77,57% dengan tingkat capaian 97,99%.

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	79,16	77,57	97,99

Infrastruktur dasar perkotaan adalah sistem fisik dan utilitas utama yang menopang kehidupan, aktivitas ekonomi, dan fungsi sehari-hari di kota. Komponen utamanya meliputi jaringan

transportasi (jalan, jembatan, transportasi umum), sistem air bersih dan limbah, energi/listrik, drainase, telekomunikasi, serta pengelolaan persampahan.

Berikut adalah rincian komponen utama infrastruktur dasar perkotaan:

- (1) Jaringan Transportasi: Jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan transportasi umum (seperti busway, MRT/LRT) untuk mobilitas.
- (2) Sistem Sumber Daya Air: Penyediaan air bersih/minum, sistem pengelolaan air limbah (sanitasi), dan sistem drainase/drainase kota untuk pengendalian banjir.
- (3) Energi dan Ketenagalistrikan: Jaringan transmisi dan distribusi listrik serta pasokan bahan bakar (minyak dan gas bumi).
- (4) Telekomunikasi: Jaringan internet, kabel serat optik, dan BTS (tower telekomunikasi) untuk konektivitas digital
- (5) Pengelolaan Sampah: Sistem pengangkutan dan pembuangan/pengolahan sampah yang memadai.
- (6) Fasilitas Sosial/Umum: Perumahan, sekolah, rumah sakit, dan taman/ruang terbuka hijau

Adapun infrastruktur dasar kewenangan yang terkait dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berupa infrastruktur pengendalian banjir seperti jaringan sungai, irigasi, drainase, infrastruktur jalan dan infrastruktur air bersih/minum, sistem pengelolaan air limbah (sanitasi).

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Daerah pada Renstra 2025-2029 pada tahun pertama Renstra ini menunjukkan realisasi kinerja pada tahun 2025 dibawah target. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan indikator Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik dengan target kinerja 79,16% terealisasi 77,57% dengan tingkat capaian 97,99%. Rendahnya capaian ini yang disebabkan masih belum meningkatnya capaian program pendukung infrastruktur antara lain sungai irigasi, drainase, jalan dan trotoar.

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Sasaran program ini adalah Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi. Indikator subkegiatan Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi dari panjang sungai yang menjadi kewenangan kota 50,50 km dengan panjang sungai yang dinormalisasi 11,57 km (22,91%) atau sebesar 38,93 km yang belum dinormalisasi atau (77,09%). Indikator subkegiatan Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dari panjang irigasi yang menjadi kewenangan kota 50,50 km dengan panjang irigasi dalam kondisi baik 11,57 km (22,91%) atau 38,93 km dalam kondisi sedang/rusak atau

(77,09%). Kondisi irigasi yang rusak disebabkan usia jaringan irigasi, timbunan akibat aliran air dari sungai pada irigasi primer.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Indikator Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman) dengan target 88,60% realisasi 100% dengan tingkat capaian 112,87% artinya 15767 rumah tangga di Kota Padang Panjang 100% telah memiliki Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Sasaran program ini adalah Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah dari total 15767 rumah tangga 14395 rumah tangga (91,30%) telah terlayani sebagai Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman sedangkan sisanya 1372 rumah tangga atau (8,7%) belum terlayani yang disebabkan masih banyak yg belum mempunyai septiktank yang standar dan membuang limbah tinja ke sungai dan drainase.
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan dengan panjang drainase 94456 mtr dengan kondisi baik sebesar 88212 mtr (93,39%) sepanjang 6244 mtr (6,61%) dalam kondisi rusak/sedang. Hal ini disebabkan Banyak kualitas saluran drainase yg harus ditingkatkan, diantaranya karena dimensi drainase eksisting yg lama, tidak lagi sanggup menampung volume limpasan air hujan di area terbuka yg makin tinggi (berkurangnya daerah serapan air). Banyak saluran drainase yg dimodifikasi (misal ditambahkan plat penutup tanpa manhole, dimensi dirubah) secara mandiri oleh masyarakat yg tidak memenuhi aspek teknis sehingga menjadi sumber masalah
- Program Penyelenggaraan Jalan
Sasaran program ini adalah Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dalam kota. Indikator subkegiatan Panjang jalan dan trotoar dalam kondisi baik. Panjang jalan yang menjadi kewenangan kota 102,225 km dengan panjang jalan dalam kondisi baik 85,752 km (83,89%) km dan 16,473 km (16,11%) sisanya dengan kondisi sedang/rusak. Untuk trotoar panjang trotoar 37,348 km yang menjadi kewenangan kota 27,071 km (72,48%) dengan panjang jalan dalam kondisi baik atau 10,277 km (27,52%) sisanya dengan kondisi sedang/rusak. Penyebab utama adalah bertambahnya panjang jalan kota yang berasal dari jalan lingkungan dalam kondisi rusak serta bencana alam tanggal 27 November 2025 ikut memperparah kondisi jalan dan belum bisa diperbaiki disebabkan keterbatasan waktu dan biaya di pengujung tahun anggaran 2025.

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja yang dapat dirangkum antara lain

1. Kondisi usia infrastruktur yang telah tua
2. Masih belum tersedianya data yang valid layanan cakupan air minum
3. Masih rendahnya kesadaran untuk melakukan sambungan rumah dengan inisiatif tersendiri
4. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat septiktank yang aman dan layak
5. Masih belum tersedianya data yang valid layanan cakupan air limbah
6. Perilaku masyarakat membuang rumah tangga ke sungai

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain:

1. Data perencanaan yang belum memadai
2. Pendanaan yang belum mencukupi dalam pencapaian target kegiatan
3. Rendahnya partisipasi masyarakat

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran Data perencanaan
2. Meningkatkan Pendanaan dengan menggunakan/memanfaatkan dana instansi vertikal
3. Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data perencanaan, sebagai bahan untuk pembangunan infrastruktur.
2. Meningkatkan Pendanaan dengan menggunakan/memanfaatkan dana instansi vertikal
3. Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
4. Dalam hal rekonstruksi pasca bencana akan dilakukan perencanaan ditahun 2026

3. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang

Capaian indikator sasaran Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan target 83,20% realisasi 83,35 dengan capaian 100,18%.

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,20	83,35	100,18

merupakan Lahan yang sesuai tata ruang Kota Padang Panjang dengan luas 2877,0829 ha dibandingkan dengan wilayah Kota Padang Panjang 2916,8724 yang diperoleh menunjukkan kesesuaian tata ruang dengan RTRW.

Untuk mendukung mencapai Sasaran Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang didukung oleh program-program sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator Presentase Penyelesaian kasus Pelanggaran target 75% realisasi 75% dengan capaian 100%. Dengan jumlah pelanggaran tata ruang sebanyak 29 kasus telah 100% diselesaikan.
- Program Penatagunaan Tanah
Sasaran program ini adalah Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan indikator Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko target 40% realisasi 40% dengan tingkat capaian 100%. Dari target pensertifikatan sebesar 7 sertifikat telah selesai 100%

4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang target 68,78 realisasi 68,75 dengan capaian 100,18 menunjukkan predikat "B" (Baik)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,75	69,60	101,24

Angka 69,60 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai kondisi sebagai berikut :

- Menyelaraskan target Perjanjian Kinerja dengan Rencana Aksi.
- Melengkapi dokumen laporan kinerja dengan analisis hasil (bukan sekadar angka capaian).
- Memperkuat efisiensi anggaran dan efektivitas SDM.
- Menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun sebelumnya untuk perbaikan ke predikat BB (Sangat Baik).

Untuk mendukung mencapai Sasaran meningkatnya kinerja OPD dengan indikator Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dengan program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota . Mengacu kepada Perwako Nomor 35 Tahun 2024 fungsi Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran DPUPR yang mengsinergikan dengan 9 program lainnya yang dilaksanakan di tahun anggaran 2025 dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun capaian indikator sasaran untuk RPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk RPD Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas (RPD 2024-2026)

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	74,35	77,57	104,33

Sasaran Kinerja Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas indikator Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik adalah data rata-rata pembangunan jalan, irigasi, sungai drainase, trotoar, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab dengan target kinerja 74,34% terealisasi 77,57% dengan tingkat capaian 104,33%. Dibandingkan dengan capaian Renstra 2025 -2029 capaian ini yang disebabkan target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan target renstra Tahun 2025-2029.

2. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang (RPD 2024-2026)

Capaian indikator sasaran Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan target 3 realisasi 3 dengan capaian 100%

Sasaran	Indikator	Tahun 2025		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks Penilaian pemanfaatan ruang	3	3	3

merupakan Lahan yang sesuai tata ruang Kota Padang Panjang dengan luas 2877,0829 ha dibandingkan dengan wilayah Kota Padang Panjang 2916,8724 ha. Indeks 3 dengan range indeks 75% s/d 100% nilai 98,64% yang diperoleh menunjukkan kesesuaian tata ruang dengan RTRW

Faktor yang mendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2024 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

2. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 mengacu pada Perubahan RPJMD 2025-2029 dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya seperti tabel berikut.

Tabel 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023, 2024 dan 2025

Sasaran/Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
RPJMD 2025-2029									
Indikator Sasaran : Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	95,50	86,02	90,07	72,88	78,96	108,34	79,16	77,18	97,50
Indikator Sasaran : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang							83,20	83,35	100,18
Indikator Sasaran : Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							68,75	69,60	101,24
RPD 2024-2026									
Indikator Sasaran : Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	95,50	86,02	90,07	72,88	78,96	108,34	79,16	77,18	97,50
Indikator Sasaran : Indeks penilaian pemanfaatan ruang	3	3	100	3	3	100	3	3	100

Untuk sasaran dengan indikator Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik dengan target kinerja tahun 2025 79,16% terealisasi 77,57% dengan tingkat capaian 97,99%. Jika dibandingkan dengan target indikator sasaran yang sama ditahun 2024 72,88% realisasi 78,96% dengan tingkat capaian 108,34% menunjukkan capaian tahun 2025 dibawah capaian tahun 2024 yang disebabkan capaian program pendukung infrastruktur antara lain sungai irigasi, drainase, jalan dan trotoar. Untuk indikator sasaran lainnya tidak dapat dibandingkan disebabkan perbedaan indikator yang akan dibandingkan.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir
Renstra Tahun 2025-2029

No.	Sasaran	Indikator	Reslisasi Tahun 2025	Target Akhir RPJMD 2025-2029
1	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	77,57	79,67
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,35	84,20
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69,60	79,67

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir
RPD Tahun 2024-2026

No.	Sasaran	Indikator	Reslisasi Tahun 2025	Target Akhir RPJMD 2025-2029
1	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	77,57	76,11
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks penilaian pemanfaatan ruang	3	3

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pembandingan realisasi kinerja sasaran Dinas Pekerjaan dengan standar nasional belum dapat dibandingkan disebabkan belum tersedianya data disebabkan akses untuk data tersebut tidak ada.

3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan yaitu Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa : - Sumber Daya Manusia yang kompeten - Sumber Dana yang mencukupi - Sarana dan Prasarana yang memadai. Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian SAKIP OPD. Pada tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya mengelola sumber daya secara optimal efektif dan akuntabel guna mendukung pencapaian kinerja.

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Pada tahun anggaran 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program, kegiatan, subkegiatan berorientasi pada pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja dengan dukungan alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Tingkat efisiensi terlihat pada pelaksanaan kegiatan swakelola fisik yang menghemat biaya perancangan dan biaya pengawasan yang biasanya dilaksanakan oleh rekanan pihak kedua. Dalam rangka efisiensi penggunaan kertas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengganti dengan penggunaan softcopy. Penghematan juga terjadi pada penggunaan sumber daya listrik dan air.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dimanfaatkan secara optimal berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Dalam pencapaian target infrastruktur menggunakan pegawai yang sesuai dengan bidang keahlian dan latar pendidikan.

Pemanfaatan sumber daya manusia ditunjukkan dalam beberapa langkah sebagai berikut :

1. Adanya counter khusus pelayanan penataan ruang di DMPTSP

2. Tenaga lapangan yang selalu siap untuk mendukung untuk kejadian extraordinary seperti bencana alam dan lainnya
- 3 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2025 menggunakan aset yang tersedia dan tidak terdapat pengadaan aset bergerak yang baru. Efisiensi terlihat seluruh aset kendaraan roda 2 yang biasanya dipegang oleh beberapa pegawai telah sepenuhnya ditarik dan diatur penggunaan kembali.

Tabel 3.4
Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Nama Barang	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Peralatan Kantor			Peralatan dan Mesin Rusak Berat	138	2.129.875.324,07	
	- Meja Kursi	127	345.136.344,00	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	7	538.209.400,00	
	- Komputer / Laptop	34	710.413.519,00	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	10	9.994.131.555,00	
	- Printer/Periphera	13	114.262.000,00				
2	Bangunan	1	493.567.692,35				
3	Kendaraan Bermotor						
	- Sepeda Motor	19	214.919.000,00				
	- Minibus	5	711.170.000,00				
	- Pickup	4	245.400.000,00				
	- Bus Toilet & Truk Tinja	2	650.379.000,00				

Analisis penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur optimal	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
Kualitas sumber daya konstruksi yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM konstruksi yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM konstruksi	Pembinaan dan pelatihan sumber daya konstruksi
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target

Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Memanfaatkan pendanaan instansi vertikal Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.
--	---	---	---

3.3 Realisasi Anggaran

Secara umum pencapaian Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mencapai target yang ditetapkan dengan target pendanaan tahun 2025 sebesar Rp. 25.806.747.752,- terealisasi sebesar Rp.21.475.877.305 atau 83,22%.

Berikut ini adalah realisasi Target kinerja dan keuangan menggunakan target yang tercantum di dalam renstra untuk tahun 2025 sedangkan realisasi keuangan menggunakan realisasi dari APBD tahun 2025 pada Tabel 3.5 :

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Sasaran	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	BELANJA DAERAH	25.965.352.251,00	21.475.877.304,79	82,71
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.169.801.914,00	6.923.810.731,00	96,57
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.364.949.565,00	6.223.610.753,00	97,78
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.364.949.565,00	6.223.610.753,00	97,78
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.194.233,00	170.222.043,00	97,72
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.550.000,00	2.507.200,00	98,32
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.499.533,00	24.647.650,00	96,66
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.249.700,00	8.966.400,00	87,48
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.895.000,00	134.100.793,00	98,68
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.999.116,00	285.624.335,00	90,67
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.499.116,00	18.396.438,00	89,74
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.500.000,00	265.227.897,00	90,68
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	315.659.000,00	244.353.600,00	77,41
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	39.196.000,00	34.072.450,00	86,93	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.368.000,00	193.417.150,00	83,96
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.935.000,00	11.155.000,00	31,04
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	2.730.000,00	68,25
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.160.000,00	2.979.000,00	48,36
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.982.406.630,00	2.925.489.700,37	98,09
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	923.000.000,00	893.431.580,00	96,80
	Normalisasi/Restorasi Sungai	923.000.000,00	893.431.580,00	96,80
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.059.406.630,00	2.032.058.120,37	98,67
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.059.406.630,00	2.032.058.120,37	98,67
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	364.936.340,00	355.534.000,00	97,42
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	364.936.340,00	355.534.000,00	97,42
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	364.936.340,00	355.534.000,00	97,42
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	823.951.100,00	589.453.114,00	71,54
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	823.951.100,00	589.453.114,00	71,54
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	209.889.500,00	208.062.000,00	99,13
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	331.500.000,00	313.753.000,00	94,65
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	282.561.600,00	67.638.114,00	23,94
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.810.936.850,00	2.680.612.942,00	70,34
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.810.936.850,00	2.680.612.942,00	70,34
	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	1.566.094.000,00	1.150.268.000,00	73,45
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	2.244.842.850,00	1.530.344.942,00	68,17
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.125.827.000,00	1.133.832.294,00	36,27
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.125.827.000,00	1.133.832.294,00	36,27
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.597.737.000,00	685.033.294,00	42,88
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.463.260.000,00	405.532.000,00	27,71	
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	64.830.000,00	43.267.000,00	66,74	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	6.848.497.617,00	6.334.902.488,42	92,5
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	6.848.497.617,00	6.334.902.488,42	92,5
	Pembangunan Jalan	1.050.239.273,00	1.036.141.058,00	98,66
	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.785.758.344,00	4.289.813.490,00	89,64
	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.012.500.000,00	1.008.947.940,42	99,65
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	92.376.500,00	88.314.700,00	95,6
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	56.693.600,00	54.469.200,00	96,08
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	56.693.600,00	54.469.200,00	96,08
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	29.752.900,00	28.641.900,00	96,27
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2.289.900,00	1.590.000,00	69,44
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	27.463.000,00	27.051.900,00	98,5
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5.930.000,00	5.203.600,00	87,75
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	5.930.000,00	5.203.600,00	87,75
Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	665.468.600,00	414.582.160,00	62,3
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	123.318.600,00	86.941.810,00	70,5
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	123.318.600,00	86.941.810,00	70,5
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	83.140.000,00	80.024.358,00	96,25
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	83.140.000,00	80.024.358,00	96,25
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	459.010.000,00	247.615.992,00	53,95
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	400.500.000,00	236.548.492,00	59,06
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	58.510.000,00	11.067.500,00	18,92
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	81.149.700,00	29.345.175,00	36,16
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	81.149.700,00	29.345.175,00	36,16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	81.149.700,00	29.345.175,00	36,16

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 merupakan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran utama Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024-2026 dengan mempedomani Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. LKJIP tahun 2025 disusun dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu menggunakan penghitungan kinerja RPD tahun 2024-2026 dan penghitungan kinerja Renstra Tahun 2025-2029.

Tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak dengan indikator IKLI KePUan. Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran dengan 3 (tiga) sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan indikator sasaran Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik
2. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan indikator sasaran Presentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian 3 (tiga) indikator sasaran dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan indikator Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik dengan target kinerja 79,16% terealisasi 77,57% dengan tingkat capaian 97,99%. Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain:
 1. Kondisi infrastruktur yang sebagian telah berumur tua
 2. Data perencanaan yang belum memadai
 3. Pendanaan yang belum mencukupi dalam pencapaian target kegiatan
 4. Rendahnya partisipasi masyarakat

Untuk mengatasi faktor penghambat tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data perencanaan

2. Meningkatkan Pendanaan dengan menggunakan/memanfaatkan dana instanasi vertikal
3. Sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
3. Capaian indikator sasaran Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan target 83,20% realisasi 83,35 dengan capaian 100,18% merupakan peruntukan lahan yang sesuai tata ruang Kota Padang Panjang dengan luas 2877,0829 ha dibandingkan dengan wilayah Kota Padang Panjang 2916,8724 yang diperoleh menunjukkan kesesuaian tata ruang dengan RTRW.

Faktor yang mendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2025 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

4. Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang target 68,75 realisasi 69,60 dengan capaian 101,24

Realisasi Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 69,60 menunjukkan predikat "B" (Baik) berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai kondisi sebagai berikut :

- Menyelaraskan target Perjanjian Kinerja dengan Rencana Aksi.
- Melengkapi dokumen laporan kinerja dengan analisis hasil (bukan sekadar angka capaian).
- Memperkuat efisiensi anggaran dan efektivitas SDM.
- Menindaklanjuti rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun sebelumnya untuk perbaikan ke predikat BB (Sangat Baik).

Adapun capaian 2 (dua) indikator sasaran RPD 2024-2026 dalam pencapaian tujuan dimaksud, yakni :

1. Sasaran Kinerja Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas indikator Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik adalah data rata-rata pembangunan jalan, irigasi, sungai drainase, trotoar, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab dengan target kinerja 74,34% terealisasi 77,57% dengan tingkat capaian 104,33%. Dibandingkan dengan capaian Renstra 2025 -2029 capaian ini yang disebabkan target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan target renstra Tahun 2025-2029.
2. Capaian indikator sasaran Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang dengan target 3 realisasi 3 dengan capaian 100% merupakan Lahan yang sesuai tata ruang Kota Padang Panjang dengan luas 2877,0829 ha dibandingkan dengan wilayah Kota Padang

Panjang 2916,8724 ha. Indeks 3 dengan range indeks 75% s/d 100% nilai 98,64% yang diperoleh menunjukkan kesesuaian tata ruang dengan RTRW.

Faktor yang mendukung capaian kinerja adalah program/kegiatan OPD pada tahun 2024 sebagian besar telah sesuai/sinkron dengan indikasi program/kegiatan yang tertuang pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Padang Panjang, 20 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno Hatta No. 104 Padang Panjang Telp. (0752) 82565

Email: dispupr@padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WITA DESI SUSANTI, ST**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HENDRI ARNIS**

Jabatan : **WALI KOTA PADANG PANJANG**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang,

2025

PIHAK KEDUA
WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS

PIHAK PERTAMA
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	74,35%	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	79,16%
2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Penilaian Pemanfaatan ruang	3,00	2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,20%
				3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,75

No.	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.420.743.606,00	7.169.801.914,00	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.491.358.910,00	2.982.406.630,00	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	200.500.000,00	364.936.340,00	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	872.731.600,00	823.951.100,00	
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	3.940.773.850,00	3.810.936.850,00	
6	Program Penataan Bangunan Gedung	557.500.000,00	3.125.827.000,00	
7	Program Penyelenggaraan Jalan	2.762.428.370,00	6.848.497.617,00	
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	267.000.000,00	92.376.500,00	
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	395.201.950,00	665.468.600,00	
10	Program Penatagunaan Tanah	12.650.000,00	81.149.700,00	
	Jumlah	18.920.888.286,00	25.965.352.251,00	

WALI KOTA PADANG PANJANG



HENDRI ARNIS



Padang Panjang, 2025
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
KOTA PADANG PANJANG**



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002



Lampiran 2
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INDIKATOR KINERJA UTAMA									
RPD TAHUN 2024-2026					RENSTRA TAHUN 2025-2029				
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	DEFENISI OPERASIONAL	NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	DEFENISI OPERASIONAL
1	2	3	4						
1.	Meningkatnya infrastruktur infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	%	Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang direncanakan x 100%	1	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	%	Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang direncanakan x 100%
2.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks penilaian pemanfaatan ruang	angka	Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (Na)	2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (Na)
					3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	angka	Jumlah Presentase bobot/Nilai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi internal dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Soekarno-Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 PadangPanjang
email : dispupr@padangpanjang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR : 050/ 39 /DPUPR-PP/X/2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 – 2029**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP 197412232002122002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Nomor : 050/39/DPUPR-PP/X/2025
 Tanggal : 1 Oktober 2025
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	%	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman Masih rendahnya akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan Belum Optimalnya infrastruktur dasar perkotaan 	Rata-rata pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,tro toar, bangunan, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,tro toar, bangunan, sarana sanitasi yang direncanakan x 100%	Rata-rata Jumlah persentase pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,tro toar, bangunan, sarana air minum/sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan,irigas, sungai,drainase,tro toar, bangunan yang direncanakan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR Kota Padang Panjang	
2.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	<ol style="list-style-type: none"> Belum Optimalnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan daerah Belum optimalnya pengendalian tata ruang disebabkan oleh masih rendahnya ketaatan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan 	Persentase rasio menunjukkan peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan	Presentase kesesuaian program struktur Ruang + pola ruang : 2 x100%	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR Kota Padang Panjang	

3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	angka	Belum Optimalnya Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Presentase bobot yang dibanding dengan Nilai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi internal dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Presentase bobot/Nilai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi internal dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
----	---------------------------------------	--	-------	--	---	---	--	--	--

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno-Hatta No. 104 Telp. (0752) 82565 PadangPanjang
email : dispupr@padangpanjang.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR : 050/01 /DPUPR-PP/1/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 - 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,**


**WIDYA KUSUMA, S.T.
NIP. 19750901 200501 1 008**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Nomor : 050/01/DPUPR-PP/1/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024
 Tentang : Penerapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN						KETERANGAN
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA		
1.	Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	%	1. Belum optimalnya layanan infrastrukturnya drainase 2. Layanan infrastruktur jalan belum memadai 3. Layanan infrastruktur SDA masih ada yang tidak berfungsi 4. Belum terpenuhinya layanan infrastruktur air minum kota 5. Layanan infrastruktur air limbah belum optimal 6. Pembangunan Infrastruktur Gedung belum sesuai ketentuan yang berlaku	Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana sanitasi yang direncanakan x 100%	Rata-rata Jumlah persentase pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan, sarana air minum/sanitasi yang dibangun atau direhab/Rata-rata pembangunan jalan, irigas, sungai, drainase, trotoar, bangunan yang direncanakan	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR Kota Padang Panjang	10	

2.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks penilaian pemanfaatan ruang	Indeks	1. Belum terintegrasinya penataan ruang dan pertanahan dalam proses penyusunan dokumen rencana tata ruang 2. Belum optimalnya pengendalian tata ruang disebabkan oleh masih rendahnya ketataan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum 3. Masih rendahnya kepastian hukum aset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (Na)	Indeks dari Luas pemanfaatan ruang sesuai RTR (Ha)/Total luas pemanfaatan ruang RTR (Ha) x100%	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas PUPR Kota Padang Panjang	
----	--	------------------------------------	--------	---	---	--	-----------------------------------	--------------------------------	--

**a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**


**WIDYA KUSUMA, S.T.
NIP. 19750901 200501 008**

Lampiran 3.1 Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan I Tahun 2025

REALISASI RENAKSI TRIWULAN I TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN II			ANGGARAN TRIWULAN II			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN				
1,1 Meningkatnya Infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas	0 Persentase sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam kondisi baik	persen												
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	%tase panjang sungai yang dikonservasi	22,82		0	2.491.358.910	43.859.000	1,76	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Alam			
				%tase jaringan irigasi dengan kondisi baik	72,96									
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0		#DIV/0!	935.000.000	0	0		0		
		km	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1,2	0	0	935.000.000		0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah refocusing anggaran	Akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 setelah proses refocusing anggaran selesai
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)	Jumlah panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	0		#DIV/0!	1.556.358.910	43.859.000	2,82		0		
		km	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,60	0,00	0	1.556.358.910	43.859.000	2,82		0	Pekerjaan Rutin irigasi telah mulai dilaksanakan Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 setelah proses refocusing anggaran selesai
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	%tase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	87,15		0	200.500.000	0	0	Bidang Cipta Karya			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	0		#DIV/0!	200.500.000	0	0		0		
		SR	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	75	0	0	200.500.000	0	0		0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian proguil wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	%ase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak	90,70		0	872.731.600	20.218.500	2,32	Bidang Cipta Karya			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	0		#DIV/0!	872.731.600	20.218.500	2,32		0		
		M3/hari	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) yang Ditingkatkan	5	0	0	177.500.000	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
		M3/hari	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5	0	0	411.920.000	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
		unit	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	0	0	283.311.600	20.218.500	7,14		0	Sedang dilaksanakan proses pencarian/survey pengadaan langki Mobil Tinja dan Mobil Toilet yang merupakan pekerjaan dengan anggaran besar pada sub kegiatan	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	%ase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92		0	3.940.773.850	105.082.000	2,67	Bidang Cipta Karya			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	0		#DIV/0!	3.940.773.850	105.082.000	2,67		0		
		sistem drainase	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1	0	0	2.157.224.600	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
		sistem drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1	0	0	1.783.549.250	105.082.000	5,89		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	%ase Bangunan Ber IMB	46,39		0	557.500.000	0	0	Bidang Cipta Karya			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	0		#DIV/0!	557.500.000	0	0		0		
		Bangunan gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3	0	0	507.500.000	0	0		0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
		dokumen	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30	0	0	50.000.000	0	0		0	Telah terlaksana 15 Dokumen	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	%ase infrastruktur trobar dalam kondisi baik	90,33		0	2.762.428.370	94.858.000	3,43	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Alam			
				%ase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	95,87		0							
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara	0		#DIV/0!	2.762.428.370	94.858.000	3,43		0		
		km	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1	0	0	703.683.000	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 setelah refocusing selesai
		km	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3	0	0	1.132.250.000	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 setelah refocusing selesai
		km	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2	0,00	0	926.495.370	94.858.000	10,24		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025 setelah refocusing selesai

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	%Jasa Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66		0	267.000.000	0	0	Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti	0		#DIV/0!	200.000.000	0	0	0			
		orang	Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30	0	0	150.000.000	0	0	0	Dana yang tersedia tidak mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan	dilaksanakan tahun 2026	
		lembaga	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lembaga Jasa Konstruksi yang Dibinaan dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0,00%	#DIV/0!	50.000.000	0	0	0	tidak tersedia dana untuk pelaksanaan kegiatan	dilaksanakan tahun 2026	
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0		#DIV/0!	55.000.000	0	0	0			
		perangkat pendukung	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	0,00%	0	5.000.000	0	0	0	0	telah dilaksanakan	
		dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	40	0,00%	0	50.000.000	0	0	0	0	kegiatan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025	
			Pengawasan Terib Usaha, Terib Penyelenggaraan dan Terib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi terib usaha, terib	0		#DIV/0!	12.000.000	0	0	0	0		
		paket pekerjaan	Pengawasan dan Evaluasi Terib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Terib Penyelenggaraan	30	0	0	12.000.000	0	0	0	0	akibat terjadinya efisiensi dan pergeseran anggaran kegiatan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025	
1,2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan	0	Indeks penilaian pemanfaatan	0										
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kelataan terhadap RTRW per tahun	0,23		0	395.201.950	0	0	Bidang Tata Ruang			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	0		#DIV/0!	303.164.000	0	0	0			
		dokumen	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	1	0	0	303.164.000	0	0	0	0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih.	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	0		#DIV/0!	52.900.000	0	0	0		
		sistem informasi	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	0	0	52.900.000	0	0	0	0 Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penerbitan dan penegakan hukum bidang tata ruang yang	0		#DIV/0!	39.137.950	0	0	0		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0 Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
		laporan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Tertindakannya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2	0	0	16.827.950	0	0	0	0 Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
		dokumen	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil penilaian kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dan	1	0	0	22.310.000	0	0	0	0 Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai
		prosentase	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	%lase sertifikat aset tanah dan bangunan pemerintah kota	85		0	12.650.000	0	0	0	Bidang Tata Ruang	
		sertifikat	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan	0		#DIV/0!	12.650.000	0	0	0		
		laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	1	20	12.650.000	0	0	0	0 Sudah dilakukan persiapan administrasi kegiatan dan penyampaian dokumen pengurusan PTSL, penerbitan aset tanah infrastruktur Ke-PU-an ke BPN	Dilaksanakan proses refocusing anggaran selesai

TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD

NO	UNIT	NAMA	PARAF
1	SEKRETARIS	Medi Rosdian, S.Sos, MSI	
2	KEPALA BIDANG Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dehidra ST	
3	KEPALA BIDANG	Reynol Oktavian, ST, M.T.I	
4	KEPALA BIDANG	Chintya Mayasari, ST, MT	
5	KEPALA BIDANG	Rinayati, ST, MT	

Padang Panjang, April 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



WDYA KUSUMA, ST
NIP. 197509012005011008

Lampiran 3.2 Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan II Tahun 2025

REALISASI RENAKSI TRIWULAN II TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN II			ANGGARAN TRIWULAN II			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN			
1,1 Meningkatnya Infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas	0 Persentase sarana Infrastruktur Dasar Perkotaan dalam kondisi baik	persen											
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	%tase panjang sungai yang dikonservasi	22,82		0	2.995.431.630	135.377.406	4,52	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Alam		
				%tase jaringan irigasi dengan kondisi baik	72,96								
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0		#DIV/0!	1.550.000.000	4.000.000	0,26	0		
		km	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1,2	0	0	1.550.000.000	4.000.000	0,26	0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 setelah perencanaan selesai
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)	Jumlah panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara	0		#DIV/0!	1.445.431.630	131.377.406	9,09	0		
		km	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,60	0,05	9,09	1.445.431.630	131.377.406	9,09	0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 setelah perencanaan selesai
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	%tase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak	87,15		0	373.936.340	0	0	Bidang Cipta Karya		
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun	0		#DIV/0!	373.936.340	0	0	0		
		SR	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	75	0	0	373.936.340	0	0	0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025

			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	%ase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak	90,70		0	841.951.100	25.898.500	3,08	Bidang Cipta Karya			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	0		#DW/0	841.951.100	25.898.500	3,08		0		
		M3/hari	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Ditingkatkan	5	0	0	214.389.500	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025. Percepatan persiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk memulai proses Pekerjaan Fisik
		M3/hari	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	5	0	0	345.000.000	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025. Percepatan persiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk memulai proses Pekerjaan Fisik
		unit	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	0	0	282.561.600	25.898.500	9,17		0	Sedang dilaksanakan proses pencarian/survey pengadaan tangki Mobil Tinja dan Mobil Toilet yang merupakan pekerjaan dengan anggaran besar pada sub kegiatan	Menghubungi Produsen/Distributor nasional, sebab hasil survey awal di level Daerah (Toko, Pengecer, dll) barang tidak tersedia
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	%ase Drainase Dalam Kondisi Baik	87,92		0	3.862.186.850	135.989.400	3,52	Bidang Cipta Karya			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara	0		#DW/0	3.862.186.850	135.989.400	3,52		0		
		sistem drainase	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	1	0	0	1.591.844.000	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025. Percepatan persiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk memulai proses Pekerjaan Fisik
		sistem drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1	0	0	2.270.342.850	135.989.400	5,99		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025. Percepatan persiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk memulai proses Pekerjaan Fisik

			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	%ase Bangunan Ber IMB	46,39		0	1.879.830.000	13.400.000	0,71	Bidang Cipta Karya			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	0		#DIV/0!	1.879.830.000	13.400.000	0,71		0		
		Bangunan gedung	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3	0	0	1.845.000.000	0	0		0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali rebocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025. Percepatan persiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk memulai proses Pekerjaan Fisik
		dokumen	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30	15	50	34.830.000	13.400.000	38,47		0	Telah terlaksana 15 Dokumen	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	%ase infrastruktur trobar dalam kondisi baik	90,33		0	6.393.694.826	357.635.184	5,59	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Alam			
				%ase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	95,87		0							
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan dan Trobar yang Dibangun dan Dipelihara	0		#DIV/0!	6.393.694.826	357.635.184	5,59		0		
		km	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1	0	0	1.057.363.008	0	0		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 setelah perencanaan selesai
		km	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	3	0	0	3.710.041.818	1.718.750	0,05		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 setelah perencanaan selesai
		km	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2	0,19	9,32	1.626.290.000	355.916.434	21,89		0	Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 setelah perencanaan selesai

			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	%tase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat	66		0	61.460.900	0	0	Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti	0		#DM/0!	25.778.000	0	0				
		orang	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30	0	0	25.778.000	0	0		0	Dana yang tersedia tidak mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan	dilaksanakan tahun 2026
		lembaga	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lembaga Jasa Konstruksi yang Dibinaan dan Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0,00%	#DM/0!	0	0	#DM/0!		0	tidak tersedia dana untuk pelaksanaan kegiatan	dilaksanakan tahun 2026
			Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0		#DM/0!	29.752.900	0	0		0		
		perangkat pendukung	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1	0,00%	0	2.289.900	0	0		0	telah dilaksanakan	
		dokumen	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	40	0,00%	0	27.463.000	0	0		0	kegiatan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025	
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib	0		#DM/0!	5.930.000	0	0		0		
		paket pekerjaan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30	0	0	5.930.000	0	0		0	akibat terjadinya efisiensi dan pergeseran anggaran kegiatan dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025	
1,2	Meningkatnya kesesuaian guna lahan	0	Indeks penilaian pemanfaatan		0									
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun	0,23		0	357.068.750	1.564.500	0,44	Bidang Tata Ruang			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RRTR yang disusun	0		#DM/0!	187.050.000	0	0		0		
		dokumen	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	1	0	0	187.050.000	0	0		0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih.	Progress kegiatan baru penyusunan KAK Paket pengadaan Konsultan Individu dan akan dilanjutkan proses PBJ pihak ketiga pada semester 2 Tahun 2025
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang	0		#DM/0!	35.800.000	0	0		0		
		sistem informasi	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	0	0	35.800.000	0	0		0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Progress kegiatan baru penyusunan KAK Paket pengadaan Konsultan Individu dan akan dilanjutkan proses PBJ pihak ketiga pada semester 2 Tahun 2025

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penerbitan dan penegakan hukum bidang tata ruang yang	0		#DIV/0!	134.218.750	1.564.500	1,17	0		
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025
		laporan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2	0	0	125.638.750	0	0	0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025
		dokumen	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil penilaian kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dan	1	0	0	8.580.000	1.564.500	18,23	0	Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian progul wakil/wawako terpilih	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025
		prosentase	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	%ase sertifikat aset tanah dan bangunan pemerintah kota	85		0	4.050.000	1.023.750	25,28	Bidang Tata Ruang		
		sertifikat	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan	0		#DIV/0!	4.050.000	1.023.750	25,28	0		
		laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	1	20	4.050.000	1.023.750	25,28	0	Sudah dilakukan persiapan administrasi kegiatan dan penyampaian dokumen pengurusan PTSL pada aset tanah dibawah BPN	mempercepat proses administrasi dan kelengkapan dokumen pengurusan PTSL pada aset tanah dibawah irigasi.
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH TIM VERIFIKATOR OPD													
NO	UNIT	NAMA	PARAF										
1	SEKRETARIS	Medi Rosdian, S.Sos, MSI											
2	KEPALA BIDANG	Dodi Indra ST											
3	KEPALA BIDANG	Reynol Oktavian, ST, M.T.I											
4	KEPALA BIDANG	Chintya Mayasari, ST, MT											
5	KEPALA BIDANG	Rinayat, ST, MT											

Padang Panjang, Juli 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

WITA DESUSANTI, ST
NIP.197412232002122002

Lampiran 3.3 Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan III Tahun 2025

REALISASI RENAKSI TRIWULAN III TAHUN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN III			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN III			ANGGARAN TRIWULAN III			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN			
1 Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik		79,16		0																
											PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan	89,04		0					Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Alam	
											Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi									
											Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dir estorasi	1,2	0,06	5.027216	923.000.000	76.665.040	8.306072		Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 setelah perencanaan selesai
											Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang	Jumlah panjang irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara									
											Peningkatan Jaringan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,6	0,07	10.93121	2.059.406.630	222.079.648	10.76367		Sedang dalam proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekerjaan Fisik (Detail Engineering Design/DED). Pekerjaan Fisik segera diproses setelah DED selesai	Akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2025 setelah perencanaan selesai
											PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)	88,60		0						
											Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum									
											Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun									
											Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	75	4,79	6.390179	364.936.340	23.895.200	6.547772		Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan disebabkan terjadi beberapa kali refocusing anggaran dan penyesuaian proglu/wawako terpilih	Dilaksanakan pada semester 2 tahun 2025

Lampiran 3.4 Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan IV Tahun 2025

REALISASI RENAKSI TRIWULAN IV DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2025 (RENSTRA 2025-2029)																					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN IV			ANGGARAN TRIWULAN IV			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Langkah-langkah/ Aktivitas Pencapaian Target IKU	TW I	TW II	TW III			TW IV	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI			
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	%				79,16				77,57%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	89,04	89,04	100	2.982.406.630,00	2.925.489.700,37	98,09	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Alam		
		km									Pengelolaan SDA dan Bangunan Panganan Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,24	0,24	100	923.000.000,00	893.431.580,00	96,80			
		km									Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,24	0,24	100	923.000.000,00	893.431.580,00	96,80			
		km									Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik	22,57	22,57	100	2.059.406.630,00	2.032.058.120,37	98,67			
		km									Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman	Panjang Jaringan Irigasi Permukiman yang Direhabilitasi	22,57	22,57	100	2.059.406.630,00	2.032.058.120,37	98,67			
		%								0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)	88,6	100	112,8668	364.936.340,00	355.534.000,00	97,42	Bidang Cipta Karya		
		SR									Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindung terhadap seluruh rumah tangga di kota	53	53	100	364.936.340,00	355.534.000,00	97,42			
		SR									Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	53	53	100	364.936.340,00	355.534.000,00	97,42			
		%								0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	89,8	91,3	101,6704	823.951.100,00	589.453.114,00	71,54	Bidang Cipta Karya		
		Rumah tangga									Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik	20	20	100	823.951.100,00	589.453.114,00	71,54			
		m3/hari									Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (PLT) yang Ditingkatkan	6	6	100	209.889.500,00	208.062.000,00	99,13			
		m3/hari									Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1	1	100	331.500.000,00	313.753.000,00	94,65			
		unit									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diperasikan dan Dipelihara	2	2	100	282.561.600,00	67.638.114,00	23,94			

		%																		0	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik	93,39	93,39	100	3.810.936.850,00	2.680.612.942,00	70,34	Bidang Cipta Karya			
		Sistem Drainase																			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan dan Dipelihara	2	2	100	3.810.936.850,00	2.680.612.942,00	70,34				
		Sistem Drainase																			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	1	1	100	1.566.094.000,00	1.150.268.000,00	73,45				
		Sistem Drainase																			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan	1	1	100	2.244.842.850,00	1.530.344.942,00	68,17				
		%																			0	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	47	48	102,1277	3.125.827.000,00	1.133.832.294,00	36,27	Bidang Cipta Karya		
		dokumen																			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku	53	53	100	3.125.827.000,00	1.133.832.294,00	36,27				
		bangunan gedung																			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2	2	100	1.597.737.000,00	685.033.294,00	42,88				
		dokumen																			Pembangunan, pemeliharaan, pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemeliharaan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100	1.463.260.000,00	405.532.000,00	27,71				
		dokumen																			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	53	53	100	64.830.000,00	43.267.000,00	66,74				

		%								0 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kematapan Jalan	89,54	89,96	100,4724	6.848.497.617,00	6.334.902.488,42	92,50	Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Alam		
		km								Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	5,71	5,71	100	6.848.497.617,00	6.334.902.488,42	92,50			
		km								Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	0,67	0,67	100	1.050.239.273,00	1.036.141.058,00	98,66			
		km								Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara berkala	3,04	3,04	100	4.785.758.344,00	4.289.813.490,00	89,64			
		km								Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2	2	100	1.012.500.000,00	1.008.947.940,42	99,65			
		%								0 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi	28	0	0	92.376.500,00	88.314.700,00	95,60	Bidang Perencanaan dan Bina Jasa Konstruksi		
		orang								Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan	-	#DW0!		56.693.600,00	54.469.200,00	96,08			
		orang								Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang difasilitasi sertifikasi	-	#DW0!		56.693.600,00	54.469.200,00	96,08			
		dokumen								Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	40,00	40	100	29.752.900,00	28.641.900,00	96,27			
		perangkat pendukung								Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1,00	1	100	2.289.900,00	1.590.000,00	69,44			
		dokumen								Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	40,00	40	100	27.463.000,00	27.051.900,00	98,50			

Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	angka				68,75	Pemenuhan administrasi umum, keuangan penunjang kegiatan perangkat daerah					0,00						#DIV/0!					
		%											PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi	100	100	100	7.169.801.914,00	6.923.810.731,00	96,57	Sekretariat		
		%											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	6.364.949.666,00	6.223.610.753,00	97,78			
		orang/bn											Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686	686	100	6.364.949.666,00	6.223.610.753,00	97,78			
		%											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	174.194.233,00	170.222.043,00	97,72			
		paket											Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	100	2.550.000,00	2.507.200,00	98,32			
		paket											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	100	25.499.533,00	24.647.660,00	96,66			
		paket											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100	10.249.700,00	8.966.400,00	87,48			
		laporan											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	30	30	100	136.896.000,00	134.100.793,00	98,68			
		unit											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3	3	100	314.999.116,00	285.624.335,00	90,67			
		laporan											Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00			
		laporan											Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	100	20.499.116,00	18.396.438,00	89,74			
		laporan											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	13	100	292.500.000,00	265.227.897,00	90,68			

Lampiran 4 Matrik Tindak Lanjut 2024

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2024									
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	KONDISI TERKINI	MASALAH YANG DIHADAPI	LINK BUKTI DUKUNG
1	A. Perencanaan Kinerja								
	1 Melakukan perbaikan penjurangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan rumusan logical framework, menidentifikasi seluruh critical succes factor atas pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi	Penjurangan kinerja dengan memperhatikan logical framework disusun pada saat penyusunan Renstra 2025-2029 yang akan menjadi lampiran Renstra dimaksud	3 bulan	Oktober s/d Desember 2025	Sekretariat	Tahap penyusunan	Penyusunan pohon kinerja	tidak ada	
	2 Melakukan pemetaan pada penjurangan kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi crosscutting kinerja dengan mengidentifikasi secara spesifik bentuk kolaborasi antar organisasi dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam pencapaian kinerja								
	B. Pengukuran Kinerja								
	1 Pimpinan organisasi selaku pengambil keputusan (decision maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala.	Kepala Dinas selaku pengambil keputusan (decision maker) ikut terlibat dalam memonitoring capaian kinerja secara berkala dalam bentuk Rapat dengan eselon 3 dan 4 secara berkala	12 bulan	Januari - Desember 2025	Sekretariat	Rapat berkala telah dilaksanakan ditambah dengan permintaan informasi ke masing-masing pejabat pelaksana kegiatan	Rapat berkala telah dilaksanakan ditambah dengan permintaan informasi ke masing-masing pejabat pelaksana kegiatan	tidak ada	

	2	Memfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai	hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment dalam aplikasi TPP dan aplikasi Simbangda	12 bulan	Januari - Desember 2025	Sekretariat	hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment dalam aplikasi TPP dan aplikasi Simbangda			
	3	Melakukan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan)	pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan) melalui rapat evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas	12 bulan	Januari - Desember 2025	Sekretariat	pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan) melalui rapat evaluasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas			
	4	Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dengan memberikan penilaian kinerja pada aplikasi TPP dan simbangda	12 bulan	Januari - Desember 2025	Pejabat Struktural	dilaksanakan pada saat penilaian kinerja bulanan	telah dilaksanakan	Penilaian masih subjektif sesuai aplikasi TPP	
	5	Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.kemenpan.go.od	Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.kemenpan.go.od	3 bulan	Oktober s/d Desember 2025	Sekretariat	Sedang dilaksanakan	Sedang dilaksanakan	sumber daya yang tidak tersedia terkait konversi data ke pdf	
C. Pelaporan Kinerja										
	1	Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional (benchmar kinerja) dan analisis penggunaan sumber daya.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja sesuai dengan standar dengan menyajikan analisis secara mendalam tentang informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional (benchmar kinerja) dan analisis penggunaan sumber daya.	4 bulan	Januari - Mei 2026	Sekretariat	pengumpulan data	belum dilaksakan	akses pada ketersediaan data realisasi nasional	